

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki karakteristik perekonomian yang berbeda-beda antarwilayah. Kondisi tersebut dapat dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto yang mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan dan mengelola berbagai sumber daya yang tersedia. Oleh karena itu, PDRB digunakan sebagai indikator penting untuk menilai tingkat pertumbuhan ekonomi wilayah sekaligus kapasitas ekonomi masyarakatnya. Daerah dengan nilai PDRB yang relatif tinggi umumnya menunjukkan potensi ekonomi yang lebih besar dibandingkan wilayah lainnya (Putra & Sukartini, 2025). Dalam rangka memenuhi kebutuhan publik yang terus berkembang, pemerintah berupaya memperkuat kapasitas keuangan domestik dengan meningkatkan kemampuan pembiayaan dari sumber-sumber pendapatan dalam negeri.

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang telah di produksi oleh masyarakat dapat bertambah dan menyebabkan meningkatnya kemakmuran masyarakat. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses peningkatan aktivitas perekonomian yang ditandai dengan bertambahnya jumlah barang dan jasa yang dihasilkan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sukirno, 2019). Penerapan otonomi daerah di Indonesia telah memberikan

berbagai perubahan yang signifikan dalam kehidupan masyarakat. Setiap daerah berkembang pesat, sehingga kegiatan fiskal membutuhkan anggaran yang besar. Peningkatan anggaran ini menuntut dana yang cukup untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan. Semua pengeluaran daerah dicatat dalam APBD dan dibayarkan secara tunai untuk mendukung operasional, dengan menggunakan pendapatan daerah serta mempertimbangkan biaya yang diperlukan pemerintah dalam menjalankan kegiatannya (Fernandes & Fauzia, 2022).

Pengelolaan keuangan daerah selama ini masih menunjukkan berbagai kendala. Belanja daerah, terutama anggaran pembangunan, belum sepenuhnya berperan sebagai pendorong percepatan pembangunan wilayah. Sering ditemukan alokasi anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan, serta penggunaan dana yang kurang cermat, sehingga prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas belum tercapai. Selain itu, perencanaan belanja daerah masih menghadapi keterbatasan, seperti rendahnya kemampuan program untuk memenuhi kebutuhan publik dan efisiensi pelaksanaan anggaran yang belum optimal. Kelemahan dalam perencanaan ini juga berdampak pada kemampuan pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penerapan otonomi daerah menuntut pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel sebagai upaya untuk mendukung peningkatan kinerja pemerintahan serta mewujudkan pembangunan daerah yang efektif.

Kabupaten Pacitan merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Timur yang terus mendorong peningkatan perekonomian daerah melalui pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan keuangan daerah. Didukung oleh potensi pada sektor pertanian, perikanan, perdagangan, dan pariwisata, perkembangan ekonomi Kabupaten Pacitan menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi daerah dapat dilihat melalui perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang mencerminkan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu wilayah.

Walaupun memiliki beragam potensi ekonomi, Kabupaten Pacitan masih menghadapi kendala dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima setiap tahun belum dapat menjadi sumber utama dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah. Hal tersebut terlihat dari kontribusi PAD terhadap keseluruhan pendapatan daerah yang masih lebih rendah dibandingkan dengan penerimaan yang bersumber dari Dana Perimbangan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pembiayaan pembangunan di Kabupaten Pacitan masih memiliki ketergantungan yang cukup besar terhadap transfer keuangan dari pemerintah pusat.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Pacitan terus mengalokasikan belanja modal sebagai salah satu upaya untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan penyediaan fasilitas publik. Pembangunan jalan, jembatan,

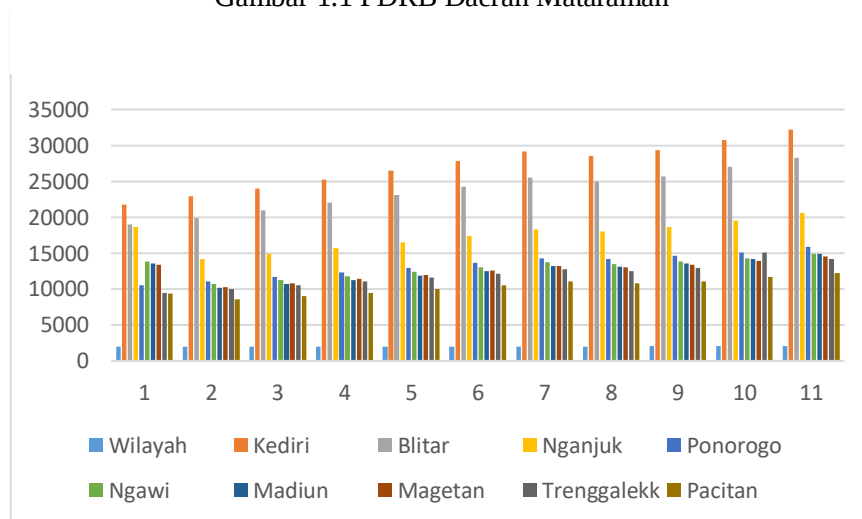
fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, serta berbagai infrastruktur lainnya diharapkan mampu memperlancar aksesibilitas dan mendorong aktivitas perekonomian masyarakat. Namun, peningkatan alokasi belanja modal tersebut perlu dianalisis lebih lanjut guna mengetahui sejauh mana pengeluaran pemerintah daerah tersebut berkontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pacitan.

Selain itu, perkembangan PDRB Kabupaten Pacitan dari tahun ke tahun menunjukkan adanya perubahan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi. Kondisi tersebut mendorong perlunya kajian mengenai peran Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Mengingat ketiga variabel tersebut memiliki keterkaitan dengan pembiayaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, diperlukan penelitian untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Pacitan.

Perkembangan perekonomian suatu wilayah dapat dilihat melalui berbagai indikator, salah satunya adalah pendapatan nasional. Pada tingkat nasional, indikator yang digunakan adalah Produk Domestik Bruto (PDB), sedangkan pada tingkat daerah digunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai gambaran mengenai nilai kegiatan ekonomi yang dihasilkan dalam suatu wilayah selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dalam hal ini menjadi salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur

keberhasilan pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Penerapan otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan serta mengelola dan mengalokasikan anggaran berdasarkan kebutuhan dan prioritas pembangunan di masing-masing daerah.

Gambar 1.1 PDRB Daerah Mataraman



Sumber : Badan Pusat Statistik 2013-2023

Kabupaten Pacitan merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Timur yang berada di bagian selatan dengan karakteristik geografis berupa wilayah perbukitan dan kawasan pesisir. Letak geografis tersebut memberikan karakteristik tersendiri terhadap pola pembangunan dan aktivitas ekonomi masyarakat. Jumlah penduduk Kabupaten Pacitan sebagian besar berada pada usia produktif yang berpotensi mendukung kegiatan ekonomi daerah. Secara administratif, Kabupaten Pacitan terdiri dari sejumlah kecamatan dan desa yang berada di bawah pemerintahan daerah kabupaten. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk mampu mengelola potensi wilayah secara optimal.

Sebagai salah satu daerah di Indonesia, Kabupaten Pacitan juga mengalami berbagai perubahan sebagai dampak dari penerapan kebijakan otonomi daerah. Pemberian kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah membuka peluang bagi Pemerintah Kabupaten Pacitan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah secara lebih mandiri serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki keleluasaan untuk menyusun perencanaan pembangunan, mengelola keuangan daerah, serta mengoptimalkan pemanfaatan potensi lokal yang dimiliki. Potensi tersebut mencakup berbagai sektor, seperti pariwisata, pertanian, perikanan, dan sumber daya alam lainnya yang dapat menjadi penggerak utama perekonomian daerah. Dengan pengelolaan yang tepat, potensi lokal tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pacitan terus tumbuh, didorong oleh otonomi daerah yang memungkinkan pemerintah lokal mengelola sumber daya secara mandiri, menetapkan prioritas pembangunan, dan mengurangi ketimpangan pendapatan melalui program-program inklusif.

Struktur perekonomian Kabupaten Pacitan masih didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Sektor tersebut memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pacitan, yang menunjukkan bahwa perekonomian daerah masih memiliki ketergantungan yang cukup besar terhadap sektor primer dan pemanfaatan

sumber daya alam. Kondisi ini menggambarkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat Pacitan masih didominasi oleh kegiatan pertanian dan belum sepenuhnya berkembang ke sektor industri maupun jasa.

Besarnya kontribusi sektor pertanian menunjukkan bahwa sektor tersebut memiliki peranan yang penting dalam mendukung perekonomian Kabupaten Pacitan. Namun, pengembangan sektor tersebut membutuhkan dukungan infrastruktur dan fasilitas ekonomi yang memadai agar produktivitas dapat meningkat dan kegiatan distribusi berjalan lebih lancar.

Dalam hal ini, pemerintah daerah memiliki peran dalam mendukung perekonomian daerah melalui pengelolaan sumber-sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan. Kedua sumber penerimaan tersebut dapat digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan daerah, salah satunya melalui belanja modal yang diarahkan pada penyediaan dan peningkatan infrastruktur. Pengalokasian belanja modal diharapkan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat sehingga turut mendukung peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pacitan.

Kondisi tersebut berkaitan erat dengan struktur perekonomian Kabupaten Pacitan yang hingga saat ini masih bertumpu pada sektor primer, khususnya sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sektor-sektor tersebut memiliki nilai tambah yang relatif rendah sehingga kontribusinya terhadap pembentukan PDRB juga terbatas. Selain itu, Pacitan belum memiliki industri pengolahan

skala besar yang mampu menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. Aktivitas industri yang ada sebagian besar masih berskala kecil dan menengah, sehingga dampaknya terhadap peningkatan nilai PDRB belum signifikan. Berbeda dengan beberapa daerah Mataraman lainnya yang telah berkembang sebagai pusat industri dan perdagangan, Pacitan masih bergantung pada aktivitas ekonomi tradisional.

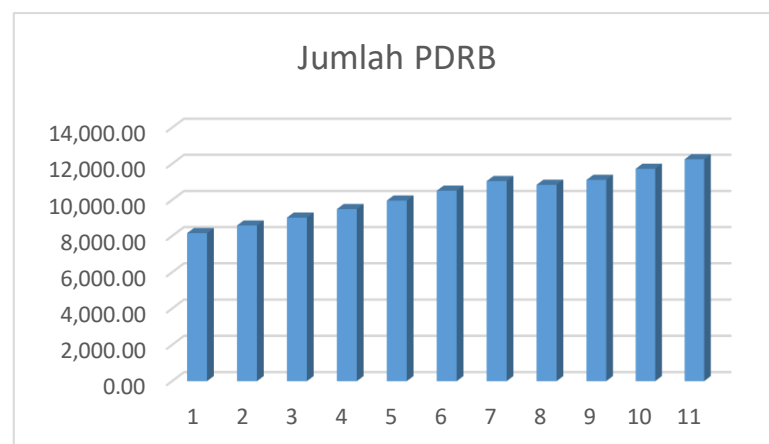
Secara konsisten, PDRB Pacitan atas dasar harga berlaku berada di kisaran Rp8-12 triliun per tahun, jauh di bawah Kediri (Rp20-30 triliun) atau Blitar (Rp15-25 triliun), dengan sektor utama pertanian (padi, jagung) dan pariwisata pantai yang rentan musiman. Kontribusi terhadap PDRB Jatim hanya 0,3-0,5%, sementara rata-rata Mataraman mencapai 1-2%, akibat luas lahan subur terbatas dan minim industri pengolahan. Geografis terisolasi di ujung tenggara Jatim membatasi akses infrastruktur dan pasar, ditambah ketergantungan pada sektor primer (pertanian 40-50% PDRB) yang fluktuatif karena iklim dan harga komoditas. Indeks pembangunan manusia rendah dan tingkat pendidikan vokasi minim menghambat diversifikasi ke manufaktur atau jasa, berbeda dengan Nganjuk atau Tulungagung yang lebih terbuka ke koridor industri Madiun-Surabaya.

Rendahnya PDRB memperburuk disparitas regional Mataraman, dengan PDRB per kapita Pacitan sekitar Rp20-25 juta/orang versus Rp30-40 juta di kabupaten pusat seperti Kediri. Strategi mahasiswa riset bisa fokus pada pengembangan agroindustri berbasis watu gamping lokal atau ekowisata

berkelanjutan untuk dorong pertumbuhan 4-5% tahunan seperti 2023. Faktor geografis juga turut memengaruhi rendahnya PDRB Pacitan. Kondisi wilayah yang didominasi oleh perbukitan dan kawasan karst menyebabkan keterbatasan lahan produktif serta menyulitkan pembangunan infrastruktur ekonomi. Aksesibilitas dan konektivitas yang relatif terbatas membuat biaya distribusi barang dan jasa menjadi lebih tinggi, sehingga mengurangi daya saing ekonomi daerah.

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pacitan menunjukkan adanya perubahan dari tahun ke tahun. Adapun data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pacitan dapat disajikan sebagai berikut:

Gambar 1.2 PDRB di Pacitan



Sumber : Badan Pusat Statistik

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pacitan selama periode 2013–2023 menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke

tahun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perekonomian daerah secara umum mengalami perkembangan yang relatif stabil. Namun, pada tahun 2020, PDRB Kabupaten Pacitan mengalami penurunan. Penurunan ini tidak terlepas dari melemahnya kinerja beberapa sektor unggulan daerah, seperti pariwisata dan perdagangan, akibat menurunnya jumlah kunjungan wisata serta berkurangnya aktivitas ekonomi masyarakat. Hal tersebut berdampak pada perlambatan perputaran ekonomi di Kabupaten Pacitan.

Selanjutnya, pada tahun 2021 nilai PDRB kembali meningkat dan terus mengalami peningkatan pada tahun 2022 sebesar serta pada tahun 2023 mencapai, yang menandakan mulai pulihnya perekonomian Kabupaten Pacitan. pada tahun 2023 belum mampu mengubah posisi Pacitan sebagai daerah dengan skala ekonomi relatif kecil karena pertumbuhan tersebut didominasi oleh sektor-sektor bernilai tambah rendah seperti pertanian, perdagangan, dan jasa dasar. Keterbatasan kontribusi sektor industri pengolahan serta belum optimalnya pengembangan sektor unggulan menyebabkan laju pertumbuhan PDRB Pacitan tertinggal dibandingkan daerah yang memiliki struktur ekonomi lebih beragam. Selain itu, kondisi geografis yang didominasi wilayah perbukitan dan keterbatasan infrastruktur turut membatasi ekspansi aktivitas ekonomi dan daya saing daerah. Oleh karena itu, meskipun PDRB Pacitan menunjukkan tren meningkat, permasalahan rendahnya PDRB secara relatif masih menjadi isu utama dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Pacitan.

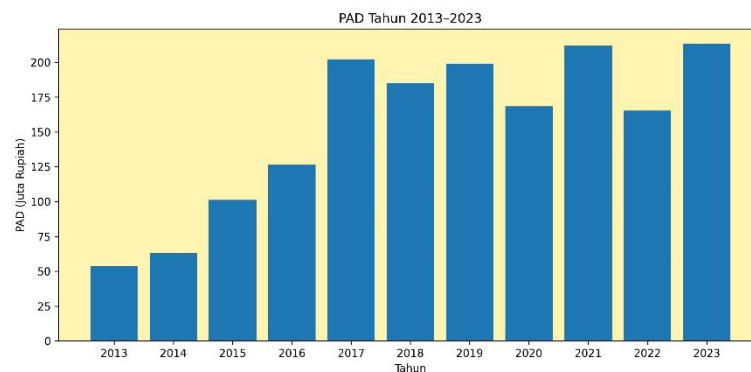
Dalam kerangka teori pertumbuhan ekonomi, besarnya Produk Domestik Regional Bruto dipengaruhi oleh berbagai faktor produksi yang menentukan kapasitas output suatu perekonomian. Model pertumbuhan Solow menjelaskan bahwa PDRB dipengaruhi oleh akumulasi modal dan pertumbuhan tenaga kerja, sedangkan kemajuan teknologi diperlakukan sebagai faktor eksogen yang berada di luar mekanisme aktivitas ekonomi (Ayunani & Nuraini, 2025) Sementara itu, teori pertumbuhan ekonomi klasik yang dikembangkan oleh Adam Smith dan David Ricardo menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, meliputi jumlah penduduk, ketersediaan modal, luas wilayah dan sumber daya alam, serta perkembangan teknologi yang diterapkan dalam kegiatan ekonomi. Keempat faktor tersebut secara bersama-sama menentukan kemampuan produksi dan arah pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber penerimaan yang berperan dalam mendukung pembiayaan pembangunan sekaligus mencerminkan tingkat kemandirian fiskal suatu daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah, semakin besar kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan secara mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat. PAD merupakan salah satu sumber pembiayaan yang dapat digunakan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, sehingga dapat mengurangi tingkat ketergantungan daerah terhadap subsidi yang diberikan

oleh pemerintah pusat (Ferdiansyah et al., 2018). Pelaksanaan desentralisasi turut membawa perubahan dalam sistem perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam mekanisme penyaluran dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. perubahan tersebut berkaitan dengan penyesuaian pola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi. Menurut (Halim & Abdullah, 2006) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang bersumber dari potensi ekonomi yang dimiliki oleh suatu daerah, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, serta sumber penerimaan lainnya. PAD menjadi salah satu sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Peningkatan PAD dapat memperbesar kemampuan keuangan daerah dan mendorong kemandirian fiskal, sehingga pemerintah daerah memiliki ruang yang lebih besar untuk mengoptimalkan potensi daerah dan mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan adanya fluktuasi dari tahun ke tahun. Adapun data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pacitan disajikan sebagai berikut:

Gambar 1.3 PAD Kabupaten Pacitan



Sumber : Badan Pusat Statistik

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pacitan selama periode 2013–2023 mengalami perubahan yang cenderung berfluktuasi dari tahun ke tahun. Meskipun secara umum mengalami peningkatan, pada beberapa tahun tertentu PAD mengalami penurunan yang menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam menghimpun pendapatan belum sepenuhnya stabil. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerimaan daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari perkembangan perekonomian daerah maupun kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pengelolaan sumber-sumber pendapatan yang tersedia.

Sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, PAD berperan penting dalam menunjang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di daerah. Peningkatan PAD menunjukkan adanya peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi ekonomi yang tersedia di wilayahnya. Sebaliknya, apabila PAD mengalami penurunan, kemampuan fiskal daerah dalam mendanai berbagai kegiatan

pembangunan dan penyediaan pelayanan publik juga dapat menjadi lebih terbatas.

Oleh karena itu, upaya untuk mengoptimalkan PAD menjadi salah satu langkah penting dalam memperkuat kemandirian keuangan daerah. Dengan kapasitas fiskal yang lebih kuat, pemerintah daerah diharapkan mampu mendorong pembangunan ekonomi yang lebih berkelanjutan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai indikator pertumbuhan ekonomi daerah.

Kontribusi tersebut muncul dari mekanisme penyerahan fungsi-fungsi utama pelayanan publik kepada pemerintah daerah yang diiringi dengan penguatan kapasitas fiskal melalui transfer dan pembagian sumber pendapatan dari pemerintah pusat, sebagaimana dijelaskan dalam prinsip *money follows functions* (Darmawan, 2020)

Pemerintah pusat menyalurkan dana perimbangan, salah satunya melalui Dana Alokasi Umum (DAU), sebagai upaya untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan pembangunan antar daerah sehingga dapat mendukung pemerataan pertumbuhan ekonomi. Dana perimbangan mencakup tiga komponen utama, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). DAU didasarkan pada prinsip keadilan, yang menegaskan bahwa setiap daerah dan seluruh warga negara berhak memperoleh layanan publik yang layak, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan, sesuai dengan standar pelayanan minimum yang

telah ditetapkan. Sementara itu, DAK diarahkan untuk mendanai program-program tertentu yang menjadi prioritas daerah, dengan tujuan mendukung percepatan pencapaian standar pelayanan minimum dalam penyediaan pelayanan publik. Adapun DBH bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pembangunan di tingkat nasional dan daerah, sekaligus mengurangi kesenjangan antara daerah penghasil dan non-penghasil sumber daya alam. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 33, mekanisme pembagian DBH dilakukan dengan prinsip *by origin*, yaitu penyaluran dana didasarkan pada realisasi penerimaan pada tahun anggaran berjalan.

Berdasarkan catatan yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan, Dana Perimbangan tercatat mengalami fluktuasi. Berikut data Dana Perimbangan Kabupaten Pacitan :

Gambar 1.4 Dana Perimbangan Pacitan



Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan grafik Dana Perimbangan Tahun 2013–2023, terlihat bahwa penerimaan Dana Perimbangan secara umum menunjukkan kecenderungan

meningkat selama periode pengamatan, meskipun mengalami fluktuasi pada beberapa tahun tertentu. Pada tahun 2013, Berdasarkan Gambar 1.3, perkembangan Dana Perimbangan Kabupaten Pacitan selama periode 2013–2023 mengalami dinamika yang ditandai dengan adanya perubahan jumlah penerimaan pada setiap tahunnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa alokasi dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tidak selalu berada pada tingkat yang sama, melainkan dipengaruhi oleh berbagai kebijakan fiskal dan kebutuhan pendanaan daerah.

Sebagai salah satu komponen utama pendapatan daerah, Dana Perimbangan memiliki peran yang penting dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan, serta pembiayaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, perubahan Dana Perimbangan yang terjadi dari tahun ke tahun menjadi aspek yang perlu diperhatikan karena dapat memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik dan pembangunan secara optimal. Secara keseluruhan, perkembangan Dana Perimbangan selama periode 2013–2023 menunjukkan tren yang positif dengan peningkatan nilai yang cukup signifikan dibandingkan tahun awal pengamatan.

Secara keseluruhan, perkembangan dana perimbangan Kabupaten Pacitan selama periode 2013–2023 menunjukkan bahwa dana perimbangan merupakan sumber pendapatan yang sangat dominan dan menentukan dalam struktur keuangan daerah. Fluktuasi yang terjadi dari tahun ke tahun mencerminkan

kuatnya pengaruh kebijakan fiskal pemerintah pusat terhadap kapasitas keuangan daerah. Kondisi ini menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut, terutama dalam kaitannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola dana perimbangan secara efektif untuk mendorong pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Belanja modal merupakan salah satu jenis pengeluaran pemerintah dalam anggaran sektor publik yang digunakan untuk memperoleh atau membangun aset tetap maupun aset lainnya yang memiliki manfaat dalam jangka panjang serta mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Pengeluaran ini berperan penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Aset yang dihasilkan dari belanja modal dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan, belanja modal mencakup pengeluaran untuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta berbagai bentuk belanja modal lainnya. Oleh karena itu, belanja modal memiliki peranan penting sebagai salah satu instrumen dalam menunjang pelaksanaan pembangunan daerah.

Belanja modal juga memiliki peranan strategis karena dampaknya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat melalui penyediaan dan perbaikan infrastruktur publik. Infrastruktur yang memadai mampu memperlancar aktivitas ekonomi, meningkatkan mobilitas masyarakat, serta menunjang

kegiatan sosial. Selain itu, belanja modal dapat meningkatkan produktivitas sektor-sektor ekonomi dan menarik minat investasi ke suatu daerah. Peningkatan investasi dan aktivitas ekonomi tersebut pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, pengelolaan belanja modal yang efektif, efisien, dan tepat sasaran sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Berdasarkan catatan yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan, Belanja Modal tercatat mengalami fluktuasi. Berikut data Belanja Modal Kabupaten Pacitan :

Gambar 1.5 Belanja Modal Pacitan



Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan Gambar 1.4, Perkembangan belanja modal Kabupaten Pacitan selama periode 2013–2023 menunjukkan kondisi yang berfluktuasi. Pada awal periode pengamatan, yaitu tahun 2013, belanja modal masih berada pada tingkat yang relatif rendah. Selanjutnya, pada periode 2014–2016 terjadi peningkatan yang cukup signifikan, yang menunjukkan semakin besarnya alokasi anggaran pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan aset tetap dan infrastruktur daerah.

Pada tahun 2017 hingga 2018, belanja modal mengalami penurunan. Kondisi ini mengindikasikan adanya penyesuaian dalam kebijakan penganggaran daerah serta perubahan prioritas pembangunan. Meskipun demikian, pada tahun 2019 belanja modal kembali meningkat, yang menunjukkan upaya pemerintah daerah untuk memperkuat pembangunan sarana dan prasarana guna menunjang aktivitas ekonomi dan pelayanan publik.

Selanjutnya, pada tahun 2020, realisasi belanja modal kembali mengalami penurunan yang cukup signifikan. Namun, pada periode 2021–2023 belanja modal menunjukkan tren peningkatan secara bertahap. Hal ini mencerminkan meningkatnya alokasi anggaran untuk pembangunan daerah dan adanya perhatian pemerintah daerah terhadap pengembangan infrastruktur serta aset produktif. Secara keseluruhan, perkembangan belanja modal Kabupaten Pacitan selama tahun 2013–2023 menunjukkan adanya dinamika dalam pengelolaan anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah.

Fluktuasi tersebut menunjukkan bahwa belanja modal sangat dipengaruhi oleh kondisi fiskal daerah, perubahan kebijakan anggaran, serta dinamika ekonomi makro. Kondisi ini menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut, terutama dalam kaitannya dengan dampak belanja modal terhadap kinerja ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat, sehingga dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan penjelasan diatas dikarenakan factor pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja modal saling berkaitan untuk mendorong terjadinya peningkatan atas produk domestik regional bruto, maka penulis melakukan penelitian yang diberi judul **“Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Belanja Modal Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Di Kabupaten Pacitan”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap PDRB di Kabupaten Pacitan?
2. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap PDRB di Kabupaten Pacitan?
3. Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap PDRB di Kabupaten Pacitan?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah terdapat tujuan yang dapat dicapai oleh peneliti yaitu :

1. Menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap PDRB Kabupaten Pacitan
2. Menganalisis pengaruh Dana Perimbangan terhadap PDRB Kabupaten Pacitan
3. Menganalisis pengaruh Belanja Modal terhadap PDRB Kabupaten Pacitan

1.4 Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup penelitian ini sebagai berikut :

1. Penelitian ini mencakup series data selama periode 2013 – 2023 pada Kabupaten Pacitan.
2. Penelitian ini menggunakan Produk Domestik Regional Bruto sebagai variabel dependen sedangkan untuk pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja modal sebagai variabel independen.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta memperluas wawasan peneliti, khususnya di bidang ilmu ekonomi, terutama dalam proses penyusunan dan penulisan karya ilmiah.

2. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan sumber informasi bagi instansi terkait dalam menetapkan maupun melanjutkan program-program pemerintah yang bertujuan untuk mendorong peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya serta sebagai bahan kajian dan sumber informasi yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Belanja

Modal terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Pacitan.